

BAB 1

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Menurut Abdul (2007) seperti dikutip Hidayat (2015) menyatakan bahwa sakarang pemerintah daerah dituntut baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal serta dari segi eksternal yaitu masyarakat yang menginginkan agar pemerintah daerah mampu menciptakan masyarakat yang makmur sebagai implikasi dari otonomi daerah yang selama ini diterapkan yang mengedepankan meningkatnya pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja.

Menurut Rosmawati (2011) seperti dikutip Hidayat (2015) salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai instansi mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, hingga perusahaan adalah kinerja. Kinerja juga termasuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari banyaknya organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi misinya. Dalam kurun waktu jangka panjang, pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja namun diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan pula. Kinerja merupakan suatu ukuran prestasi atau hasil dalam rangka menjalankan serta suatu organisasi yang berkaitan dengan segala hal yang sedang, telah, dan akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja sektor publik memiliki tiga tujuan yaitu : mengalokasikan sumber daya serta pembuatan keputusan, membantu memperbaiki kinerja pemerintah , dan yang terakhir yaitu memperbaiki komunikasi kelembagaan dan mewujudkan suatu bentuk

pertanggungjawaban organisasi publik. Mardiasmo (2009) seperti dikutip Hidayat (2015).

Pengukuran kinerja merupakan proses dan sasaran yang sistematis yang berguna untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektifitas tugas pemerintah berikut capaian sasarannya. Menurut Mardiasmo (2007, hal 44) seperti dikutip Yusmalizar (2014) pengukuran kinerja merupakan suatu ukuran mengenai hal yang dianggap penting dan seberapa baik kinerja dari suatu organisasi. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk menilai bagaimana unit organisasi yang dipimpin dan prestasi pimpinan, selain itu pengukuran kinerja sektor publik juga digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi menghasilkan pelayanan publik dan untuk menilai pimpinan.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan seluas-luasnya kewenangan untuk mengatur sendiri urusan serta kepentingan masyarakatnya seperti yang terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004, bagi pemerintah daerah penilaian kinerja menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja instansi adalah SAKD. Untuk memperkuat serta menunjang kinerja, diperlukan SAKD. Penerapan SAKD telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bab XI pasal 232 ayat 1 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan SAKD merupakan rangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara

manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Mardiasmo seperti dikutip Almada (2013) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah akan tercapai dengan diterapkannya SAKD, dan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. SAKD termasuk bagian dari akuntansi sektor publik yang berfungsi untuk mencatat serta melaporkan seluruh transaksi terkait dengan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan didalamnya yang berhubungan dengan kewajiban dan hak daerah tersebut. Wawan dan Lia (2009) seperti dikutip Hidayat (2015)

Selain bertujuan memberikan bantuan untuk memverifikasi seluruh transaksi- agar dapat ditelusuri dana- dana tersebut sesuai dengan tujuannya masing-masing, dan mengecek otoritas, efisiensi, serta keabsahan pembelajaran dana, SAKD yang memadai juga dapat mendukung capaian kinerja, karena pemerintah yang baik dapat dinilai dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri serta demi menilai akuntabilitas instansi/organisasi dan pihak manajer maka diperlukanlah pengukuran kinerja.

Faktor kedua yang turut mempengaruhi suksesnya pencapaian kinerja adalah pengelolaan keuangan daerah. Abdul (2009) seperti dikutip Hidayat (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan terdapat akuntabilitas kinerja terkait jumlah dana yang dialokasikan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, sehingga diartikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi atau

organisasi. Suatu laporan keuangan yang baik akan tercipta apabila terdapat pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa suatu organisasi atau instansi memiliki kinerja yang baik pula. APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah untuk mencapai suatu tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, pemerintah wajib membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk menilai efektifitas pelaksanaan yang dimaksud. Untuk tujuan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, diperlukan laporan keuangan sebagai suatu perwujudan laporan pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah tersebut.

Faktor lain yang turut menentukan suksesnya peningkatan kinerja dalam suatu organisasi ialah pengawasan intern. Hakikat dari pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kegagalan serta kesalahan untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi sedini mungkin. Menurut Sabeni dan Gozali (1997) seperti dikutip Djiloy (2016) menerangkan pengawasan intern merupakan alat pengawasan dari atasan organisasi atau instansi terkait dengan tujuan untuk memonitor apakah kegiatan-kegiatan bawahannya sesuai dengan kebijakan serta rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan intern merupakan suatu prosedur atau kebijakan yang memiliki tujuan untuk melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa peraturan dan undang-undang telah dipatuhi dan memastikan bahwa informasi usaha telah akurat. Pengawasan intern memiliki keterkaitan yang sangat

erat dengan perencanaan, dimana tanpa adanya perencanaan sebagai pedoman, maka pengawasan yang dilaksanakan akan menjadi sulit, begitu juga sebaliknya, tanpa adanya pengawasan intern dalam perencanaan, maka akan cenderung menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tujuan, sehingga diperlukannya perhatian yang khusus dalam setiap kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat diwujudkan atau setidaknya mendekati sasaran yang diinginkan. Reeve (2005) seperti dikutip Yusmalizar (2014)

Menurut Wawan (2009) seperti dikutip Yusmalizar (2014) pengawasan intern merupakan fungsi yang berdiri sendiri dalam organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan organisasi. Pengawasan internal didalam organisasi sektor publik, memiliki sifat khusus . Jika dibandingkan terhadap sektor *private*, instansi pemerintahan dikelola dengan nilai dan cara yang berbeda. Ciri utama yang membedakan pengelolaan keuangan sektor publik adalah Ketaatan dalam pelaksanaan anggaran. Demikian pula dalam hal pembagian kekuasaan, otonomi daerah telah diterapkan dalam pengelolaan instansi pemerintah, sehinggann vvaluasi kinerja pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan secara terpisah karena diterapkannya otonomi daerah. Salah satu tugas pemerintah yaitu menyediakan jasa dan barang yang tidak disediakan oleh sektor *private*, sehingga pengelolaan asset publik dilakukan tidak semata-mata dengan menggunakan prinsip ekonomi seperti yang dianut sektor *private* pula. Askam (2008) seperti dikutip Yusmalizar (2014)

Adapun fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya temuan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan yang dilaporkan

Pemerintah Kabupaten Ketapang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat menemukan adanya empat jenis kerugian negara dan potensi kerugian negara yang salah satunya ditemukan di Kabupaten Ketapang. Dari sejumlah temuan BPK, temuan yang paling menonjol adalah biaya perjalanan dinas pejabat di Kalbar yang tidak rasional. Bentuk temuan kerugian negara dan potensi kerugian negara dan daerah diantaranya adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kemahalan harga satuan pembelian harga barang, dan yang terakhir yaitu kurangnya volume pengerjaan fisik serta kelebihan pembayaran pekerjaan. Meskipun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi kenyataannya BPK masih menemukan banyak temuan. Jawa Pos (2016)

Pengaruh SAKD dan pengelolaan keuangan daerah diantaranya telah dilakukan oleh Hidayat (2015). Penelitian tersebut dilakukan pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman. Hasilnya menunjukkan bahwa SAKD dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Annisa (2017) meneliti tentang Pengaruh SAKD, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan *Good Governance*. Penelitian tersebut dilakukan pada SKPD Kota Pekanbaru. Hasilnya memperlihatkan bahwa SAKD, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Yusmalizar (2014) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan

keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian ini mengenai Pengaruh SAKD, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian menurut Hidayat (2015) tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, SAKD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya terletak dalam variabel independen Pengawasan Intern. Perbedaan selanjutnya terletak pada pengambilan populasi, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang. Alasan pengambilan populasi di Kabupaten Ketapang karena meskipun laporan keuangan yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang memperoleh opini WTP, namun kenyataannya BPK masih menemukan banyak temuan atas laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh SAKD, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris yang berjudul : **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh SAKD terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh SAKD terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang.
2. Mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang.
3. Mengetahui pengaruh pengawaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Ketapang.

a. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, bisa meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya SAKD, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan intern.
- b. Bagi akademis, dapat meningkatkan bukti empiris dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik.
- c. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.